

**Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Status *Financial Distress*
Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat
Periode 2012-2016**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh

RIDA DAMAI YANTI
2016/16043157

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

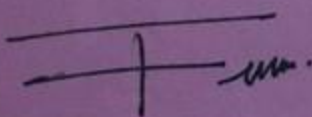
KEMAMPUAN RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI STATUS *FINANCIAL DISTRESS* PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2012-2016

Nama : Rida Damai Yanti
NIM/BP : 16043157/2016
Jurusan : Akuntansi (S1)
Fakultas : Ekonomi

Padang, 03 Mei 2018

Disetujui Oleh,

Pembimbing I



Fefri Indra Arza, SE. M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

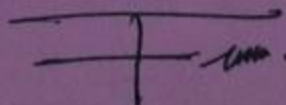
Pembimbing II



Mayar Afriyenti, SE. M.Sc
19840132 200912 2 005

Diketahui Oleh,

Ketua Jurusan Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE. M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

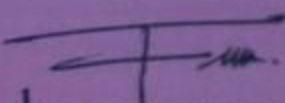
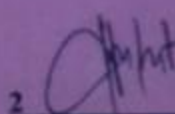
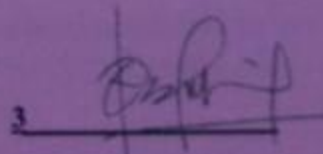
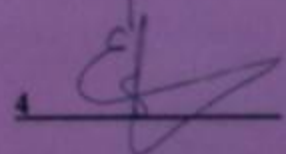
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*

KEMAMPUAN RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI STATUS FINANCIAL DISTRESS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2012-2016

Nama : Rida Damai Yanti
NIM/BP : 16043157/2016
Jurusan : Akuntansi (SI)
Fakultas : Ekonomi

Padang, 03 Mei 2018

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	 1
2.	Sekretaris	Mayar Afriyenti, SE, M.Sc	 2
3.	Anggota	Halmawati, SE, M.Si	 3
4.	Anggota	Erly Mulyani, SE, M.Si	 4

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rida Damai Yanti
NIM/Tahun Masuk : 16043157/2016
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi/19 Mei 1994
Jurusan : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Gobah, Bukik Batabuah, Kecamatan Candung,
Kabupaten Agam, Sumatera Barat
No. HP : 0852 6337 1653
Judul Skripsi : Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi
Status *Financial Distress* Pemerintah Daerah
Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat
Periode 2012-2016

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah **asli** dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik/sarjana baik di UNP maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini adalah **asli** gagasan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari dosen pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini **sah** apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan Ketua Jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini dan sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, 03 Mei 2018



Rida Damai Yanti
NIM: 16043157

ABSTRAK

Rida Damai Yanti, 2016/16043157. Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Status *Financial Distress* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2012-2016

**Pembimbing : 1. Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
2. Mayar Afriyenti, SE, M.Sc**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai kemampuan rasio keuangan dalam memprediksi status *financial distress* pemerintah daerah di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat tahun 2012 – 2016 yang diperoleh dari BPK Perwakilan Sumatera Barat. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik sensus, yaitu dengan menjadikan seluruh populasi sebagai sampel penelitian, sehingga diperoleh 19 sampel kabupaten dan kota. Metode analisis yang digunakan adalah regresi logistik biner.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *financial distress* dan variabel independennya adalah rasio keuangan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa rasio keuangan mampu memprediksi status *financial distress*. Nilai *short-term solvency ratio*, *long-term solvency ratio* dan *financial flexibility ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*, sedangkan nilai *budgetary solvency ratio* dan *financial independence ratio* berpengaruh signifikan terhadap *financial ditress* pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Berdasarkan penelitian diatas, disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk menggunakan variabel keuangan dan non keuangan sebagai variabel independen, serta mencari indikator lain yang dapat menggambarkan kondisi *financial distress* pemerintah daerah secara luas.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Status *Financial Distress* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2012-2016”**.

Skripsi ini dikerjakan demi memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Akuntansi S-1 Keahlian Akuntansi Sektor Publik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Terselesaikannya Skripsi ini tentunya tidak lepas dari dorongan dan uluran tangan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ganefri, Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang yang telah menjadi pemimpin di institusi ini.
2. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah menyediakan fasilitas kuliah dan izin dalam menyelesaikan Skripsi ini.
3. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi S-1, Bapak Hendri Agustin, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan bantuan administrasi dan membantu kemudahan dalam penelitian dan penulisan Skripsi ini.
4. Ibu Nayang Helmayunita, SE, M.Sc selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Mayar Afriyenti, SE, M.Sc selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, pengarahan, perhatian, masukan serta waktu kepada pennulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

6. Ibu Halmawati, SE, M.Si selaku Dosen Penguji I dan Ibu Erly Mulyani, SE, M.Si selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Skripsi ini.
7. Teristimewa penulis ucapkan kepada Ayah, Ibu dan Keluarga Besar yang telah memberikan kesungguhan do'a, bantuan moril dan materil kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Teman-teman Akuntansi Transfer 2016 yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, Amiin.

Padang, 03 Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II PEMBAHASAN	
A. Landasan Teori	9
1. <i>Financial Distress</i>	9
2. Belanja Modal.....	13
3. Rasio Keuangan	14
B. Penelitian Terdahulu.....	21
C. Kerangka Konseptual	23

D. Pengembangan Hipotesis	24
---------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	28
B. Populasi dan Sampel	28
C. Jenis dan Sumber Data	29
D. Metode Pengumpulan Data	29
E. Definisi Operasional Variabel	29
F. Alat Pengolahan Data	32
G. Teknik Analisis Data	32
H. Pengujian Hipotesis	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data	37
1. Rasio Belanja Modal.....	39
2. Kabupaten dan Kota Kategori Non <i>Financial Distress</i>	40
3. Statistik Deskriptif.....	41
B. Analisis Regresi Logistik Biner	43
C. Pembahasan	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Keterbatasan Penelitian	56
C. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Nama Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat	37
Tabel 2 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah.....	39
Tabel 3 Kabupaten/Kota Kategori Non <i>Financial Distress</i>	40
Tabel 4 Descriptive Statistic Kategori <i>Financial Distress</i>	42
Tabel 5 Descriptive Statistic Kategori Non <i>Financial Distress</i>	42
Tabel 6 Hasil Pengujian Nilai Likelihood.....	44
Tabel 7 Hasil Pengujian <i>Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test</i>	45
Tabel 8 Hasil Pengujian <i>Nagelkerke R Square</i>	45
Tabel 9 Hasil Pengujian Parameter Logistik.....	46

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Konseptual	24

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk mengatur roda pemerintahan di daerah, pembangunan daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Suatu daerah dapat maju dan berkembang apabila mampu menciptakan roda pemerintahan yang transparan, akuntabilitasnya tinggi dan penerapan *value for money* yang benar. Sebagai organisasi yang tidak berorientasi keuntungan, pemerintah daerah memiliki tujuan utama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut berupa : pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, infrastruktur dan penyediaan barang kebutuhan publik.

Sutaryo (2010) menyebutkan bahwa penyerahan wewenang pengelolaan keuangan daerah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menyebabkan adanya tuntutan pertanggungjawaban dari berbagai pihak, terutama pemerintah pusat. Ia juga menambahkan bahwa penyerahan wewenang ini juga akan menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam mengontrol terlaksananya anggaran daerah dibawah pengawasan pemerintah pusat.

Dalam analisis laporan keuangan dibutuhkan sebuah alat yang relevan. Subramanyam dan Wild (2013) mengatakan bahwa alat analisis keuangan yang

paling populer dan banyak digunakan adalah rasio keuangan. Ia mengatakan bahwa rasio keuangan menyatakan hubungan matematis antara dua kuantitas. Ia juga menambahkan bahwa rasio keuangan dapat mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio.

Beberapa penelitian telah menggunakan rasio keuangan dalam memprediksi kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia, yakni *financial distress*. Beberapa penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Sutaryo (2010) yang menemukan bahwa *Return On Asset (ROA)*, *Position Goverment Wealth (PosGW)*, *Current Liquidity Goverment Wealth (CLGW)*, dan *Long Term Debt to total Asset (LTDA) ratio* berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Atmaja (2012) yang menemukan bahwa rasio posisi keuangan dan rasio efisiensi berpengaruh negatif terhadap *financial distress*, sedangkan rasio hutang berpengaruh positif. Dari hasil-hasil penelitian tersebut dapat diindikasikan bahwa rasio keuangan dapat digunakan untuk memprediksi kondisi keuangan pemerintah daerah, yakni *financial distress* pada waktu yang akan datang.

Ritonga *et al.* (2012) menggunakan lima dimensi rasio keuangan untuk menilai kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Lima dimensi rasio yang digunakan oleh Ritonga *et al.* (2012) terdiri dari *short-term solvency ratio*, *long term solvency ratio*, *budgetary solvency ratio*, *financial flexibility ratio* dan *financial independence ratio*. Dimensi rasio tersebut telah dirancang sesuai

dengan model laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia, namun rasio-rasio tersebut belum diuji secara empiris kesesuaiannya terhadap prediksi *financial distress*.

Financial Distress yaitu suatu kondisi yang sampai saat ini masih menjadi pokok bahasan utama di Indonesia khususnya pada daerah. *Financial distress* terjadi salah satunya disebabkan oleh dana yang seharusnya dialokasikan sesuai dengan fungsinya tidak teralokasikan sesuai dengan semestinya. Kegagalan fungsi alokasi pemerintah dapat disebut juga sebagai *financial distress* (Tubels, 2014). *Financial distress* dapat terjadi pada berbagai jenis sektor usaha baik itu yang dimiliki swasta atau pemerintahan. Pengertian *financial distress* pada sektor pemerintahan adalah ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan pada publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan (Jones dan Walker, 2007) dalam Sutaryo, dkk (2012). Ketidakmampuan pemerintah ini karena pemerintah tidak mempunyai ketersediaan dana untuk diinvestasikan pada infrastruktur yang digunakan dalam penyediaan pelayanan pada publik tersebut. Akibat dari *financial distress* yaitu berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang tidak dapat menikmati fasilitas yang semestinya didapatkan.

Pada pemerintah daerah di Indonesia, ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur disebabkan oleh minimnya jumlah belanja modal yang dikeluarkan, pembelanjaan daerah lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai. Hal ini terlihat dari deskripsi dan analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) yang menyebutkan bahwa rata-rata rasio

belanja pegawai secara agregat provinsi, kabupaten, dan kota adalah 42,78% sedangkan untuk belanja modal masih 24,81% dari total belanja daerah.

Laporan evaluasi belanja modal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada tahun 2013, menyatakan bahwa pemerintah daerah masih mengalami penyerapan belanja modal yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah masih belum efektif dan efisien dalam mengoptimalkan belanja daerah khususnya belanja modal yang memiliki peranan penting dalam pelayanan publik. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan publik yang hasilnya dapat digunakan langsung oleh masyarakat, seperti: belanja modal jalan dan jembatan, belanja modal bangunan dan gedung untuk kegiatan kemasyarakatan, belanja modal alat-alat kedokteran, alat angkutan, belanja modal alat keamanan, belanja modal hewan ternak (Ardhini, 2011).

Penelitian ini mengacu pada penelitian Sutaryo, dkk (2012) yang meneliti tentang prediksi *financial distress* pemerintah daerah di Indonesia, dalam penelitiannya *financial distress* tersebut didefinisikan sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengembalikan baik pokok maupun bunga pinjaman. Kemampuan yang dimaksud dapat diindikasikan dengan *debt service coverage ratio* (DSCR). Sementara dalam penelitian ini prediksi *financial distress* didefinisikan sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik (Syurmita, 2014) dan indikator pengukuran yang digunakan adalah Belanja Modal, karena menurut Direktorat Jenderal Otonomi Daerah - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, pemerintah daerah kabupaten dan

kota yang ada di provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu dari beberapa pemerintah daerah yang memiliki potensi untuk mengalami *financial distress*, salah satunya pemerintah daerah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam pada tahun 2012 yang rasio belanja modalnya sangat rendah yakni 11% untuk Kota Bukittinggi dan 10% untuk Kabupaten Agam, terkait dengan rasio belanja modal yang sangat rendah, maka pemerintah daerah tersebut dinyatakan berpotensi untuk mengalami *financial distress* karena ketidakmampuan pemerintah daerah tersebut untuk menyediakan pelayanan publik yang baik.

Hal ini juga terlihat dari hasil analisa pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) tahun 2016, yang menyatakan bahwa porsi belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Sumatera Barat tahun 2015 ternyata relatif kecil, yakni hanya 22,56% dari total belanja daerah. Menurut Syurmita (2014) apabila nilai dari rasio belanja modal terhadap total belanja dibawah 30% maka dapat dinyatakan bahwa pemerintah daerah tersebut dalam status *financial distress*, hal ini dianggap relevan dengan peraturan yang berlaku (Peraturan Presiden No. 5/2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Peraturan Presiden No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Status *Financial Distress* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2012-2016”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah *short-term solvency ratio* mampu memprediksi status *financial distress* pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat?
- b. Apakah *long-term solvency ratio* mampu memprediksi status *financial distress* pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat?
- c. Apakah *budgetary solvency ratio* mampu memprediksi status *financial distress* pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat?
- d. Apakah *financial flexibility ratio* mampu memprediksi status *financial distress* pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat?
- e. Apakah *financial independence ratio* mampu memprediksi status *financial distress* pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian tentang kemampuan rasio keuangan dalam memprediksi status *financial distress* pemerintah daerah ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai kemampuan rasio keuangan berupa *short term solvency* dalam memprediksi status *financial distress* pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
- b. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai kemampuan rasio keuangan berupa *long term solvency* dalam memprediksi status *financial distress* pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

- c. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai kemampuan rasio keuangan berupa *budgetary solvency* dalam memprediksi status *financial distress* pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
- d. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai kemampuan rasio keuangan berupa *financial flexibility* dalam memprediksi status *financial distress* pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
- e. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai kemampuan rasio keuangan berupa *financial independence* dalam memprediksi status *financial distress* pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

a. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama masa pendidikan baik formal maupun informal. Selain itu diharapkan peneliti memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai indikator-indikator prediksi *financial distress* berupa rasio keuangan pada pemerintah daerah.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Untuk membuktikan bahwa rasio keuangan dapat membantu mengantisipasi kondisi masa depan, yang nantinya informasi yang tercermin dalam rasio keuangan tersebut dapat menjadi titik awal untuk merencanakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk memperbaiki kinerja dimasa depan.

d. Bagi Pemerintah Pusat

Untuk membuktikan bahwa rasio keuangan dapat dijadikan alat evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan sebagai dasar pengambilan keputusan pengawasan terhadap pejabat daerah dalam menjalankan roda pemerintahan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Financial Distress*

Financial distress merupakan suatu kondisi perusahaan yang mengalami illikuid akan tetapi masih dalam keadaan solven. Berikut ini terdapat definisi *financial distress* yaitu sebagai berikut:

Menurut Hanafi (2007:278):

financial distress dapat digambarkan dari dua titik ekstrem yaitu kesulitan likuiditas jangka pendek sampai insolvabel. Kesulitan keuangan jangka pendek biasanya bersifat jangka pendek, tetapi bisa berkembang menjadi parah. Indikator kesulitan keuangan dapat dilihat dari analisis aliran kas, analisis strategi perusahaan, dan laporan keuangan perusahaan.

Menurut Plat dan Plat dalam Fahmi (2013:158) mendefinisikan *financial distress*:

Sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. *Financial distress* dimulai dengan ketidakmampuan memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga termasuk kewajiban dalam kategori solvabilitas.

Menurut Lizal dalam Febrina (2010:197) mengelompokkan penyebab kesulitan, yang disebut dengan Model Dasar Kebangkrutan atau Trinitas Penyebab

Kesulitan Keuangan. Terdapat alasan utama mengapa perusahaan bisa mengalami *financial distress* dan kemudian bangkrut, yaitu:

a. *Neoclassical model*

Financial distress dan kebangkrutan terjadi jika alokasi sumber daya di dalam perusahaan tidak tepat. Manajemen yang kurang bisa mengalokasikan sumber daya (aset) yang ada di perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan.

b. *Financial model*

Pencampuran aset benar tetapi struktur keuangan salah dengan *liquidity constraints*. Hal ini berarti bahwa walaupun perusahaan dapat bertahan hidup dalam jangka panjang tapi ia harus bangkrut juga dalam jangka pendek.

c. *Corporate governance model*

Menurut model ini, kebangkrutan mempunyai campuran aset dan struktur keuangan yang benar tapi dikelola dengan buruk. Ketidakefisienan ini mendorong perusahaan mengalami masalah dalam tata kelola perusahaan yang tak terpecahkan.

Menurut Almilia dan Kristijadi dalam Febrina (2010:198) berbagai pihak yang berkepentingan untuk melakukan prediksi atas kemungkinan *terjadi nya financial distress* adalah:

a. Pemberi Pinjaman atau Kreditor

Institusi pemberi pinjaman memprediksi *financial distress* dalam memutuskan apakah akan memberikan pinjaman dan menentukan

kebijakan mengawasi pinjaman yang telah diberikan pada perusahaan. Selain itu juga digunakan untuk menilai kemungkinan masalah suatu perusahaan dalam melakukan pembayaran kembali pokok dan bunga.

b. Investor

Model prediksi *financial distress* dapat membantu investor ketika akan memutuskan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan.

c. Pembuat Peraturan atau Badan Regulator

Badan regulator mempunyai tanggung jawab mengawasi kesanggupan membayar hutang dan menstabilkan perusahaan individu. Hal ini menyebabkan perlunya suatu model untuk mengetahui kesanggupan perusahaan membayar hutang dan menilai stabilitas perusahaan.

d. Pemerintah

Prediksi *financial distress* penting bagi pemerintah dalam melakukan *antitrust regulation*.

e. Auditor

Model prediksi *financial distress* dapat menjadi alat yang berguna bagi auditor dalam membuat penilaian *going concern* perusahaan. Pada tahap penyelesaian audit, auditor harus membuat penilaian tentang *going concern* perusahaan. Jika ternyata perusahaan diragukan *going concern-nya*, maka auditor akan memberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas atau bisa juga memberikan opini *disclaimer* (atau menolak memberikan pendapat).

Pada sektor pemerintahan, *financial distress* adalah ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik sesuai standar mutu pelayanan yang ditetapkan. Salah satu standar mutu pelayanan ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah adalah alokasi belanja modal. Menurut Jones dan Walker (2007), *financial distress* merupakan ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan pada publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Ketidakmampuan pemerintah ini karena pemerintah tidak mempunyai ketersediaan dana untuk diinvestasikan pada infrastruktur yang digunakan dalam penyediaan pelayanan pada publik tersebut.

Kondisi kekurangan atau ketidaktersediaan dana ini mengindikasikan bahwa pemerintah mengalami kesulitan keuangan. Clark (1977) membahas empat indikator keterbatasan keuangan/fiskal pemerintah yang meliputi; 1) probabilitas *default*, yang didefinisikan sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah membayar obligasinya; 2) indikator rasio, seperti utang bruto dibagi dengan pajak berdasarkan utang jangka pendek, 3) indikator berbasis sosial dan ekonomi, seperti ukuran populasi dan rata-rata pendapatan per kapita, dan 4) indikator aliran kas. Indikator lain yang berpotensi dapat menunjukkan *stress* pemerintah daerah adalah *merger*. Perusahaan swasta yang mengalami kesulitan keuangan dapat mencari mitra *merger* dan biasanya menyatu dengan mitra bisnis yang dalam posisi keuangan yang kuat. Namun, *merger* pemerintah daerah dibatasi oleh pertimbangan geografis. Biasanya, pemerintah daerah yang mengalami kesulitan keuangan bergabung dengan pemerintah daerah yang berdekatan dan hanya sedikit akan mengalami perbaikan keuangannya (Jones dan Walker, 2007).

2. Belanja Modal

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58/2005 pasal 26 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Financial distress pemerintah daerah dalam penelitian ini didefinisikan sebagai ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan pada publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Kemampuan yang dimaksud dapat diindikasikan dengan belanja modal sebagaimana dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, bahwa porsi belanja modal yang ditetapkan adalah sebesar 30%. Bagi pemerintah daerah yang tidak mampu mencapai tingkat belanja modal tersebut dapat dinyatakan berpotensi untuk mengalami *financial distress*, karena seharusnya belanja modal dapat dioptimalkan guna menyediakan pelayanan publik yang maksimal.

Dibandingkan belanja modal, pemerintah daerah lebih mendominasi ke belanja pegawai, sehingga penyerapan belanja daerah untuk belanja modal masih kecil.

3. Rasio Keuangan

Penggunaan analisis rasio keuangan pada sektor publik khususnya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Abdul Halim 2007:L-4).

Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan yang paling populer dan banyak digunakan. Subramanyam dan Wild (2013) mengatakan bahwa rasio dapat mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio. Oleh karena itu, rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai kondisi keuangan pemerintahan. Ritonga *et al.* (2012) menggunakan lima dimensi rasio keuangan untuk melihat kondisi keuangan di Indonesia, yang terdiri dari *short term solvency*, *long term solvency*, *budgetary solvency*, *financial flexibility*, dan *financial independence ratio*.

a. Short-Term Solvency Ratio

Brigham dan Houston (2010) mendefenisikan *short-term solvency ratio* atau biasa disebut dengan rasio likuiditas sebagai rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar perusahaan lainnya dengan kewajiban lancarnya. Dalam lingkungan pemerintahan hal ini berarti rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Ritonga *et al.* (2012) mengatakan bahwa formula *short term solvency ratio* yang dapat digunakan yaitu :

$$R \quad S = \frac{A \quad L}{K \quad J \quad P}$$

Ritonga *et al.* (2012) mengatakan bahwa semakin tinggi nilai rasio ini maka semakin tinggi tingkat likuiditas suatu pemerintah daerah. Namun, ia menambahkan bahwa nilai yang terlalu tinggi dalam rasio ini dapat menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki aktiva lancar yang berlebihan sehingga akan muncul suatu *idle capacity* yang bisa digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, aktiva lancar yang berlebihan juga bisa menyebabkan penurunan layanan kepada masyarakat.

b. Long-Term Solvency Ratio

Wilson *et al.* (2006) mendefenisikan *long-term solvency ratio* sebagai rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah untuk jangka panjang dalam membayar semua kewajibannya. Ritonga *et al.* (2012) mengatakan bahwa

long-term solvency ratio dapat menunjukkan bagaimana keberlanjutan dari suatu pemerintah daerah.

Ritonga *et al.* (2012) menggunakan rasio ekuitas terhadap total aset untuk mengukur *long-term solvency ratio*. Rasio ini menunjukkan bagian mana dari total aset pemerintah daerah yang dibiayai dengan sumber daya sendiri. Semakin tinggi nilai dari rasio ini, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai asetnya untuk jangka panjang.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, maka formula yang dapat digunakan untuk mengukur *long-term solvency ratio* adalah :

$$R \quad L = \frac{T \quad E}{T \quad lA}$$

c. *Budgetary Solvency Ratio*

Wilson *et al.* (2006) memberikan defenisi *budgetary solvency ratio* sebagai rasio yang dapat mengukur kemampuan pemerintah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup selama periode anggaran normal untuk memenuhi pengeluarannya tanpa terkena defisit. Ritonga *et al.* (2012) mengatakan indikator dari dimensi *budgetary solvency ratio* harus menunjukkan keseimbangan antara pendapatan usaha dan pengeluaran operasi selama periode fiskal. Ritonga *et al.* (2012) menjelaskan bahwa semakin tinggi nilai dari rasio ini maka semakin baik kemampuan pendapatan suatu pemerintah daerah untuk menutupi pengeluaran operasionalnya.

Formula yang digunakan dalam mengukur *budgetary solvency ratio* adalah sebagai berikut :

$$R \quad B = \frac{T \quad P}{T \quad B}$$

Menurut UU No. 23/2014 pasal 1 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah menurut PP No.71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja lain-lain/tidak terduga.

d. *Financial Flexibility Ratio*

CICA (1997) dalam Ritonga *et al.* (2012) memberikan definisi *financial flexibility ratio* sebagai rasio yang dapat mengukur kemampuan pemerintah dalam meningkatkan sumber daya keuangannya untuk menanggapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang. Berdasarkan pada definisi tersebut berarti indikator dari dimensi ini harus menunjukkan keseimbangan antara kapasitas pendapatan dan kapasitas utang selama periode fiskal. Ritonga *et al.* (2012) menggunakan rasio berikut untuk mengukur *financial flexibility ratio* :

$$R \quad F = \frac{(T \quad P \quad - D \quad A \quad K)}{T \quad K}$$

Ritonga *et al.* (2012) mengatakan bahwa semakin tinggi nilai dari rasio tersebut maka semakin tinggi tingkat fleksibilitas keuangan suatu pemerintah daerah. Hal ini berarti pemerintah daerah tersebut akan lebih mampu untuk

menghadapi peristiwa luar biasa yang bisa datang, baik itu bersumber dari internal maupun eksternal.

e. *Financial Independence Ratio*

CICA (1997) dalam Ritonga *et al.* (2012) mendefenisikan *financial independence ratio* sebagai rasio yang dapat mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk tidak membutuhkan sumber dana, kontrol atau pengaruh dari luar baik dari sumber nasional maupun internasional. Ritonga *et al.* (2012) menjelaskan, untuk memenuhi definisi tersebut pembilang dari rasio ini harus merupakan pendapatan asli daerah dan penyebut harus merupakan total pendapatan atau pengeluaran.

Pfeffer dan Salancik (1978) menjelaskan tentang teori ketergantungan sumber daya yang menjelaskan mengenai hubungan antar organisasi. Ia mengatakan bahwa sebuah organisasi dipandang memiliki sifat seperti makhluk hidup (*organisme*) yang kelangsungan hidupnya akan tergantung pada lingkungannya. Organisasi mengambil sumber daya dari lingkungannya, seperti bahan baku dan tenaga kerja. Organisasi yang mampu menguasai sumber daya vital atau bisa mengurangi ketidakpastian dalam hubungannya dengan organisasi lain akan memiliki kekuatan yang paling besar.

Syurmita (2014) menambahkan, bahwa dalam pemerintah daerah, kekuatan (*power*) sumber daya keuangan dapat tercermin dari besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah tersebut. UU No. 23/2014 pasal 285 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa terdapat tiga komponen sumber pendapatan daerah, yaitu pendapatan asli daerah,

pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain yang sah. Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus merupakan bagian dari dana transfer yang didapatkan dari pemerintah pusat. Masih dalam UU yang sama, menyebutkan bahwa pemerintah pusat akan memberikan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus untuk menutup kekurangan pendapatan asli daerah. Berdasarkan teori ketergantungan tersebut, maka daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang terbesar lah yang memiliki kemampuan yang lebih besar.

Dengan demikian, semakin rendahnya nilai dari rasio ini maka hal itu menunjukkan semakin berkurangnya *financial independence* suatu pemerintah daerah. Dari pernyataan-pernyataan tersebut Ritonga *et al.* (2012) menggunakan formula berikut ini untuk mengetahui tingkat *financial independence* suatu pemerintah daerah, yaitu :

$$R \quad F = \frac{T \quad P \quad A \quad D}{T \quad P}$$

Hasil analisis rasio keuangan digunakan sebagai tolok ukur untuk (Mahmudi, 2011):

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Berdasarkan hasil dari analisis rasio keuangan daerah akan diketahui tingkat kemandirian keuangan daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah. Berdasarkan hasil dari analisis rasio keuangan daerah akan diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi keuangan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya. Berdasarkan hasil dari analisis rasio keuangan daerah

akan diketahui apakah Pemerintah Daerah aktif atau tidak membelanjakan dana yang ada untuk kegiatan pembangunan.

4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah. Berdasarkan hasil dari analisis rasio keuangan daerah akan diketahui sumber manakah yang memberikan kontribusi terbesar dan terkecil dalam pembentukan pendapatan daerah yang terdiri atas PAD, Pendapatan Transfer yang terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Provinsi untuk kota/kabupaten), dan Lain-lain Pendapatan yang sah.
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Berdasarkan hasil dari analisis rasio keuangan daerah akan diketahui apakah daerah mengalami pertumbuhan atau tidak dalam perolehan pendapatan. Selain itu, juga akan diketahui apakah daerah mengalami pertumbuhan atau tidak dalam hal pengeluaran keuangan daerah, dilakukan dalam rentang waktu tertentu. Hasilnya akan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan oleh Pemerintah Daerah untuk masa yang akan datang.

Penggunaan analisis rasio keuangan pada organisasi sektor publik, khususnya Pemda belum banyak dilakukan, tidak seperti untuk sektor privat yang sudah sering dilakukan. Hal tersebut dikarenakan :

1. Keterbatasan penyajian laporan keuangan pada organisasi Pemda yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh organisasi yang bersifat privat.

2. Penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun struktur APBD.

Pihak yang berkepentingan dengan analisis rasio keuangan pada laporan keuangan daerah adalah (widodo, 2001: 261):

1. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).
2. Pemerintah eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
3. Pemerintah pusat/provinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
4. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.

B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai acuan untuk memperoleh gambaran mengenai persamaan dan perbedaan dari penelitian yang ada sehingga peneliti dapat mengembangkan penelitian selanjutnya. Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan oleh para peneliti untuk memprediksi status *financial distress* pemerintah daerah antara lain:

1. Jones and Walker (2007), melakukan penelitian tentang *Local Government Distress* di Australia. Penelitian ini menguji apakah *council characteristic*, *infrastructure* dan *financial variable* berpengaruh terhadap *local service delivery*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *council characteristic*,

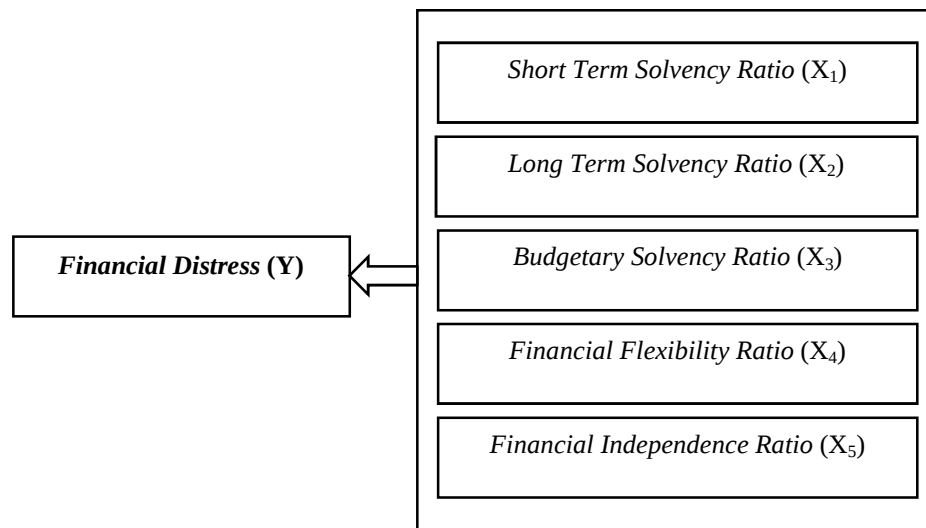
infrastructure dan *financial variable* berpengaruh signifikan terhadap *local service delivery*.

2. Sutaryo dan Bambang Sutopo (2010), melakukan penelitian mengenai Nilai Relevan Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rasio kinerja, rasio posisi keuangan, rasio efisiensi dan rasio hutang untuk memprediksi *financial distress*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kinerja, rasio posisi keuangan dan rasio hutang relevan digunakan untuk melihat prediksi status *financial distress* pemerintah daerah di Indonesia.
3. Khoirul Fariz Atmaja (2012), melakukan penelitian mengenai Analisis Rasio Keuangan untuk Memprediksi Kemungkinan *Financial Distress*. Dalam penelitian ini, rasio kinerja tidak berpengaruh dalam memprediksi *financial distress*, rasio posisi keuangan dan rasio efisiensi berpengaruh negatif terhadap *financial distress* sementara rasio hutang berpengaruh positif dalam memprediksi *financial distress*.
4. Sutaryo *et al.* (2012), melakukan penelitian tentang Relevansi Informasi Laporan Keuangan *Cash Modified Basis*: Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Status *Financial Distress* Pemerintah Daerah di Indonesia. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio kinerja, rasio struktur modal untuk memprediksi status *financial distress*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio-rasio tersebut berpengaruh signifikan terhadap *financial distress* pemerintah daerah di Indonesia.

5. Syurmita (2014), melakukan penelitian mengenai Prediksi *Financial Distress* Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rasio kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, solvabilitas, populasi penduduk dan umur wilayah untuk memprediksi *financial distress*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan dan populasi berpengaruh negatif terhadap *financial distress*, derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap *financial distress*, sementara solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan rasio-rasio keuangan berupa *short-term solvency ratio*, *long term solvency ratio*, *budgetary solvency ratio*, *financial flexibility ratio* dan *financial independence ratio*. Beberapa peneliti telah menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan *financial distress* dan temuan empiris yang di dapat menunjukkan simpulan yang belum sepakat, karena untuk beberapa faktor disimpulkan berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap kemungkinan *financial distress*. Oleh karena itu diadakan penelitian lebih lanjut untuk menguji bagaimana pengaruh yang sebenarnya. Model dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Konseptual

D. Pengembangan Hipotesis

1. Short Term Solvency Ratio dan Financial Distress

Brigham dan Houston (2010) mendefenisikan *short-term solvency ratio* atau biasa disebut dengan rasio likuiditas sebagai rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar perusahaan lainnya dengan kewajiban lancarnya. Dalam lingkungan pemerintahan hal ini berarti rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Sutaryo *et al.* (2012) menemukan bukti empiris bahwa *current asset* dibagi *current liabilities* dapat digunakan untuk *memprediksi financial distress* pemerintah daerah di Indonesia.

Ritonga *et al.* (2012) menyebutkan bahwa semakin tinggi nilai dari rasio ini maka semakin tinggi tingkat likuiditas suatu pemerintah daerah. Oleh sebab itu, semakin tinggi nilai dari rasio *short-term solvency* maka, semakin

kecil kemungkinan suatu pemerintah daerah mengalami *financial distress*. Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : *Short Term Solvency Ratio* berpengaruh signifikan negatif terhadap *financial distress*

2. *Long Term Solvency Ratio* dan *Financial Distress*

Wilson *et al.* (2006) mendefenisikan *long-term solvency ratio* sebagai rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah untuk jangka panjang dalam membayar semua kewajibannya. Sementara untuk penelitian ini, Ritonga *et al.* (2012) mengatakan bahwa *long-term solvency ratio* dapat menunjukkan bagaimana keberlanjutan dari pemerintah daerah. Ritonga *et al.* (2012) menggunakan rasio ekuitas terhadap total aset untuk mengukur solvabilitas jangka panjang. Rasio ini menunjukkan bagian mana dari total aset pemerintah daerah yang dibiayai dengan sumber daya sendiri. Semakin tinggi nilai dari rasio ini maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai total asetnya dengan sumber daya sendiri. Maka hipotesis yang dapat disusun adalah :

H₂ : *Long Term Solvency Ratio* berpengaruh signifikan negatif terhadap *financial distress*

3. *Budgetary Solvency Ratio* dan *Financial Distress*

Wilson *et al.* (2006) memberikan definisi *budgetary solvency ratio* sebagai rasio yang dapat mengukur kemampuan pemerintah untuk menghasilkan

pendapatan yang cukup selama periode anggaran normal untuk memenuhi pengeluaran tanpa terkena defisit. Ritongga *et al.* (2012) mengatakan bahwa semakin tinggi nilai dari rasio ini maka semakin baik kemampuan pendapatan pemerintah untuk menutupi pengeluaran operasionalnya. Dengan demikian, semakin tinggi nilai dari dimensi *budgetary solvency ratio* ini maka semakin rendah kemungkinan terjadinya *financial distress*. Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara total pendapatan yang ada dengan total belanja yang harus dikeluarkan. Oleh sebab itu peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : *Budgetary Solvency Ratio* berpengaruh signifikan negatif terhadap *financial distress*

4. *Financial Flexibility Ratio* dan *Financial Distress*

CICA (1997) dalam Ritongga *et al.* (2012) memberikan definisi *financial flexibility ratio* sebagai rasio yang dapat mengukur kemampuan pemerintah dalam meningkatkan sumber daya keuangannya untuk menanggapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang.

Ritongga *et al.* (2012) mengatakan bahwa semakin tinggi nilai dari rasio ini, maka semakin tinggi tingkat fleksibilitas keuangan pemerintah daerah tersebut. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah tersebut akan lebih mampu untuk menghadapi peristiwa luar biasa yang bisa datang, baik itu bersumber dari internal maupun eksternal. Salah satu peristiwa luar biasa

tersebut adalah terjadinya *financial distress*, sehingga hipotesis yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

H₄ : *Financial Flexibility Ratio* berpengaruh signifikan negatif terhadap *financial distress*

5. *Financial Independence Ratio* dan *Financial Distress*

CICA (1997) dalam Ritonga *et al.* (2012) mendefenisikan *financial independence ratio* sebagai rasio yang dapat mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk tidak membutuhkan sumber dana, kontrol, atau pengaruh dari luar baik dari sumber nasional maupun internasional.

Syurmita (2014) menambahkan, bahwa dalam pemerintah daerah, kekuatan (*power*) sumber daya keuangan dapat tercermin dari besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah tersebut, ia menemukan bahwa kemandirian pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Rasio ini digunakan untuk menggambarkan proporsi pendapatan asli daerah dari keseluruhan total pendapatan, semakin besar rasio tersebut maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah dinilai mampu untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Maka hipotesis yang dapat disusun adalah sebagai berikut :

H₅ : *Financial Independence Ratio* berpengaruh signifikan negatif terhadap *financial distress*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang telah peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Nilai *short term solvency ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress* pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat dan gagal mendukung hipotesis pertama. Hal ini dikarenakan menurut Harun (2009) ukuran hutang tidak relevan untuk sektor publik.
2. Nilai *long term solvency ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress pemerintah* daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat sehingga gagal mendukung hipotesis kedua. Hal ini terjadi karena kelanjutan atau pembiayaan proyek-proyek tertentu tergantung dari persetujuan parlemen (Harun, 2009).
3. Nilai *budgetary solvency ratio* berpengaruh signifikan terhadap *financial distress* pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat, namun koefisiennya bernilai positif sehingga gagal mendukung hipotesis ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menutupi pengeluaran operasionalnya belum baik, sehingga pemerintah daerah tersebut tidak dapat terhindar dari *financial distress*.
4. Nilai *financial flexibility ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress* pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat sehingga gagal mendukung hipotesis keempat. Hal ini dikarenakan *financial*

flexibility ratio dalam penelitian ini menyertakan hutang dalam perhitungannya.

5. Nilai *financial independence ratio* berpengaruh signifikan negatif terhadap *financial distress* pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat sehingga berhasil mendukung hipotesis kelima, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan yang tinggi pada pemerintah daerah untuk tidak membutuhkan sumber dana, kontrol atau pengaruh luar dimana hal tersebut digambarkan melalui proporsi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan yang tinggi akan cenderung terhindar dari *financial distress*.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Hasil dari kesimpulan penelitian ini memberikan bukti bahwa rasio keuangan mampu memprediksi status *financial distress* pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah pusat untuk melakukan upaya untuk mendorong pemerintah daerah melakukan pembangunan dalam hal menghindari *financial distress* pada sektor publik.

Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi bahwa keadaan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat berpengaruh terhadap tingkat pelayanan yang diberikan, sehingga hal ini dapat menjadi alat evaluasi kinerja pemerintah pusat dalam rangka kontrol terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah daerah yang dijadikan sampel hanya pemerintah daerah yang ada di Sumatera Barat saja, karena hal itu, kemungkinan hasil ini tidak dapat di generalisasi untuk pemerintah daerah di Indonesia.
2. Indikator yang dijadikan sebagai faktor penentu variabel dependen hanya terdiri dari satu variabel, yaitu rasio belanja modal terhadap total belanja daerah yang nilainya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Indikator tersebut menurut peneliti belum menggambarkan keseluruhan pengertian dari *financial distress* pada sektor publik.
3. Penelitian ini hanya menyertakan indikator keuangan sebagai variabel independen. Sedangkan faktor non keuangannya tidak disertakan.

D. Saran

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka saran peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah Pusat

Melakukan upaya yang dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang dapat digunakan untuk pelayanan publik.

2. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat

Berupaya untuk dapat mengurangi belanja pegawai dan mengalokasikannya ke belanja modal. Hal ini dilakukan untuk mendorong pembangunan infrastruktur dalam rangka pelayanan kepada publik yang lebih baik.

3. Untuk Penelitian Berikutnya

- a) Menggunakan indikator keuangan dan non keuangan sebagai variabel independen. Beberapa contoh indikator non keuangan tersebut adalah *good governance*, kondisi wilayah, jumlah penduduk, pemekaran wilayah dan umur daerah.
- b) Mencari dan menggunakan indikator lain yang dapat menggambarkan kondisi *financial distress* pemerintah daerah secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, Khoirul Fariz. 2012. "Analisis Rasio Keuangan untuk Memprediksi Kemungkinan Financial Distress". *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang.
- Brigham, Eugene F.&Houston, Joel F. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harun. 2009. *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hosmer, David W.&Lemeshow, Stanley. 2000. *Applied Logistic Regression*. Canada: John Willey & Sons, Inc.
- Jones, Stewart and R., G., Walker. 2007. Explanators of Local Government Distress. *ABACUS*. 43(3): 396-418.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia: Nomor 13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia: Nomor 64 Tahun 2013. *Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 58 Tahun 2005. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2010. *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2015. *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019*.
- Platt, H., dan M. B. Platt. 2002. Predicting Financial Distress. *Journal of Financial Service Professionals*. 56: 12-15.
- Pratiwi, Mutiara Galuh. 2015. Prediksi Status Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2014. Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ritonga, Irwan Taufiq et al. 2012. "Assessing Financial Condition of Local Government in Indonesia: an Exploration". *Public and Municipal Finance*. Vol. 1: 37-50.

Sartika, Dewi. 2016. Analisis Prediksi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2011-2013. Naskah Publikasi. Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Setiawan, Budi. 2014. *Teknik Praktis Analisis Data Penelitian Sosial & Bisnis dengan SPSS*. Yogyakarta: ANDI.

Subramanyam, K.R&Wild, John J. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Sutaryo, Bambang, S., dan Doddy, S. 2010. Nilai Relevan Informasi Laporan Keuangan Terkait *Financial Distress* Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto, 13-14 Oktober.

Sutaryo et al. 2012. "Relevansi Informasi Laporan Keuangan Cash Modified Basis: Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Status Financial Distress Pemerintah Daerah di Indonesia". *Jurnal dan Prosiding SNA-Symposium Nasional Akuntansi*.

Syurmita. 2014. "Prediksi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia". *Symposium Nasional Akuntansi XVII*. Lombok, Universitas Mataram.

www.djpk.depkeu.go.id

www.kemendagri.go.id